



**STRATEGI KEAMANAN MARITIM INDONESIA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN
KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI ASIA TENGGARA**
**INDONESIAN MARITIME SECURITY STRATEGY IN DEALING WITH TRANSNATIONAL
CRIME THREATS IN SOUTHEAST ASIA**

Muhammad Sajidin¹, Inggar Saputra², Wida Nofiasari³

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat, muh.sajidin@unsulbar.ac.id, 085718022006

²Fakultas Hukum, Universitas Jakarta, inggarsaputra88@gmail.com, 082123849941

³Fakultas Komputer dan Media, Universitas Media Nusantara Citra, wnofiasari@gmail.com, 081317848181

ABSTRAK

Salah satu ancaman yang sering muncul bagi Indonesia dan negara di Asia Tenggara adalah kejahatan yang melintasi batas negara atau kejahatan transnasional (*Transnational crime*). Kejahatan jenis ini muncul akibat kedekatan geografis wilayah suatu negara yang berdampak mudahnya akses untuk melakukan kejahatan transnasional. Untuk mengatasi kejahatan transnasional tersebut, diperlukan tindakan hukum, operasi intelijen dan upaya diplomasi antar negara Asia Tenggara untuk mencegah agar kejahatan transnasional tidak lagi terjadi di lautan. Tujuan utama penelitian ini adalah melihat bagaimana strategi keamanan maritim yang tepat bagi Indonesia untuk menghadapi kejahatan transnasional di Asia Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan menggunakan teori dan konsep dari buku, jurnal, artikel media massa dan lainnya. Hasil penelitian menyebutkan untuk menghadapi kejahatan transnasional diperlukan tiga langkah strategis. Pertama kerjasama antara penegak hukum lintas negara. Kedua adanya operasi intelijen Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya untuk mengungkap dan menekan praktek kejahatan transnasional. Ketiga, peningkatan upaya diplomasi maritim antar negara Asia Tenggara dalam menghadapi praktek kejahatan transnasional. Kesimpulan penelitian adalah diperlukan koordinasi penegak hukum, intelijen dan diplomasi maritim antara Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya dalam menekan dan menghadapi kejahatan transnasional di Asia Tenggara.

Kata kunci: Strategi, Keamanan, Maritim, Kejahatan Transnasional

ABSTRAK

One of the threats that often arises for Indonesia and countries in Southeast Asia is transnational crime. This type of crime arises due to the geographical proximity of a country's territory which has an impact on easy access to commit transnational crimes. To overcome these transnational crimes, legal action, intelligence operations and diplomatic efforts between Southeast Asian countries are needed to prevent transnational crimes from happening again in the seas. The main objective of this research is to see how the maritime security strategy is appropriate for Indonesia to deal with transnational crime in Southeast Asia. The research method used is descriptive. Data analysis used qualitative data analysis. The data collection technique is a literature study using theories and concepts from books, journals, mass media articles and others. The results of the study stated that to deal with transnational crime three strategic steps are needed. The first is cooperation between law enforcers across countries. Second, there are intelligence operations from Indonesia and other Southeast Asian countries to uncover and suppress transnational criminal practices. Third, increasing maritime diplomacy efforts between Southeast Asian countries in dealing with transnational crime practices. The conclusion of the research is that it is necessary to coordinate law enforcement, intelligence and maritime diplomacy between Indonesia and other Southeast Asian countries in suppressing and dealing with transnational crimes in Southeast Asia.

Keywords: Strategy, Security, Maritime, Transnational Crime

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terluas di dunia dengan kekayaan laut berlimpah yang memberikan jutaan manusia di dunia sebuah kehidupan. Lautan Indonesia dijuluki *Marine Mega Biodiversity* yang mengandung delapan ribu lebih spesies ikan, lima ratus lebih spesies rumput laut dan seribu spesies biota terumbu karang (Priyono, 2010) Kekayaan alam lautan Indonesia merupakan sebuah bentuk sumber daya ekonomi yang diyakini mampu memberikan sumbangsih besar kepada perekonomian nasional dan kehidupan manusia di dunia. Ekspor kekayaan lautan Indonesia ikut mempengaruhi volume transaksi perdagangan di dunia dan menggerakkan perekonomian secara global.

Kondisi ini menempatkan sektor kelautan dan maritim menempati posisi strategis yang berkembang secara dinamis baik ditinjau dari aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan-keamanan. Selain kekayaan laut, budaya maritim yang didukung kearifan lokal sudah mendarah daging dalam kehidupan manusia Indonesia. Cerita sejak zaman dahulu bahwa Indonesia adalah bangsa pelaut yang suka bertualang hadir dalam kehidupan masyarakat. Hal ini ditambah perhatian pemerintah Indonesia yang secara serius mengusung konsep “Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia” sehingga mampu mendukung kemajuan sektor kelautan bangsa Indonesia di ranah regional dan global.

Sejarah maritim Indonesia ikut mempengaruhi perkembangan sektor kelautan dan maritime Indonesia. Kita semua mengetahui bagaimana Indonesia melalui catatan sejarah perjuangan yang panjang dari hegemoni zaman kerajaan yang menguasai jalur perdagangan lautan di Asia Tenggara, kemudian mulai mengalami kemunduran akibat penjajahan negara Barat seperti Portugis, Spanyol dan Belanda. Kondisi mulai membaik ketika dalam perkembangan kontemporer, bangsa Indonesia aktif memperjuangkan kedaulatan maritim melalui konsepsi wawasan nusantara sehingga mampu melahirkan Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 sampai ketetapan Indonesia sebagai negara kepulauan. Adanya UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) atau Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 membuktikan kepercayaan dan pengakuan internasional kepada sektor kelautan dan maritime Indonesia dalam pergaulan internasional (Yakti & Wicaksana, 2021; Syafril Hidayat & Ridwan, 2017)

Posisi strategis Indonesia baik secara geografis, geopolitik dan geoekonomi jelas berpotensi mendatangkan keuntungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tetapi harus diakui pula, kondisi itu menimbulkan kerawanan dari sisi pertahanan dan keamanan khususnya keamanan maritim. Keamanan maritim menjadi isu yang penting setelah ancaman yang bersifat non tradisional berkembang pesat dan melibatkan aktor baik yang bersifat nasional, regional dan internasional. Kita menyaksikan bagaimana

keamanan maritim semakin kompleks dengan meningkatnya operasi tempur di laut khususnya berkaitan dengan kejahatan transnasional. (Fajriah & Latifah, 2018)

Keamanan maritim sangat berkaitan dengan upaya setiap negara dalam mengamankan batas maritim dan yurisdiksi dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang mengganggu kedaulatan negara tersebut dalam sektor maritim. Kejahatan transnasional yang bersifat lintas negara menjadi salah satu kejahatan yang banyak terjadi di negara kepulauan termasuk Indonesia dan wilayah negara Asia Tenggara lainnya yang mengganggu kepentingan nasional setiap negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa menjelaskan tujuh ancaman spesifik di bidang kemaritiman, yakni (1) Pembajakan dan perompakan bersenjata terhadap kapal; (2) Aksi terorisme terhadap pelayaran, instalasi di laut, dan kepentingan-kepentingan maritim lainnya; (3) Penyelundupan senjata dan senjata pemusnah massal; (4) Penyelundupan narkoba dan bahan-bahan psiktropika; (5) Penyelundupan manusia lewat laut; (6) Penangkapan ikan secara ilegal; dan (7) Pencemaran lingkungan laut (N. Klein, 2010).

Mengacu kepada maraknya ancaman keamanan maritim yang ada, secara bentuk ancamannya dapat dikelompokkan ancaman politik, ancaman ekonomi dan ancaman lingkungan hidup. Sementara berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi ancaman dalam negeri dan luar

negeri Untuk ancaman luar negeri, Indonesia secara geografis perlu memperhatikan kerjasama pencegahan dan penindakan kejahatan transnasional dengan negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Melalui partisipasi aktif dalam persekutuan regional ASEAN dan kerjasama lintas negara diharapkan mampu menemukan solusi bersama dalam menghadapi kejahatan transnasional di Asia Tenggara.

Kita semua memahami, ASEAN merupakan sebuah kawasan yang secara geopolitik memiliki resiko cukup tinggi terhadap berbagai potensi gangguan dan ancaman keamanan maritim khususnya serangan kejahatan transnasional. Berbagai bentuk ancaman keamanan maritim itu perlu melibatkan penegakan hukum komprehensif, terpadu dan terkoordinasi antar negara di Asia Tenggara, operasi intelijen yang bersifat sharing informasi dan pengalaman antar anggota ASEAN dan peningkatan upaya diplomasi keamanan maritim yang mampu menekan praktek kejahatan transnasional. Ketiga elemen itu dirasakan penting dan mendesak disebabkan pola kejahatan dan serangan pelaku kejahatan transnasional semakin massif belakangan ini.

Dalam segi diplomasi, negara di Asia Tenggara sudah memiliki forum kerjasama ASEAN Regional Forum (ARF) yang bertujuan mendialogkan masalah politik dan keamanan kawasan sehingga mampu membangun dan mendorong adanya perubahan pola konstruksi hubungan antara

kekuatan utama dengan kepentingan dalam regional . Pembangunan forum kerjasama maritim antar negara di Asia Tenggara merupakan tindak lanjut nyata dari *ASEAN Security Forum (ASC)* yang merupakan pilar dari *ASEAN Community*. ASC bertujuan menciptakan kawasan Asia Tenggara yang terpadu, damai dan tangguh berdasarkan prinsip tanggung jawab bersama untuk mengatasi dan melawan isu keamanan maritime non-tradisional khususnya ancaman kejahatan lintas negara (kejahatan transnasional)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Indonesia dalam menghadapi kejahatan transnasional di Asia Tenggara. Strategi Indonesia tercerminkan dalam tiga konsep strategis yaitu pencegahan secara hukum yang melibatkan penegak hukum lintas negara, operasi intelijen dan diplomasi maritim Indonesia dengan negara Asia Tenggara lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, dimana peneliti berusaha memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007) Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan menggunakan teori dan konsep dari buku, jurnal, artikel media massa dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keamanan Maritim Indonesia dan Asia Tenggara

Keamanan maritim menjadi isu yang selalu hangat untuk diperbincangkan bagi setiap negara yang memiliki batasan geografis dengan lautan. Keamanan maritim diartikan sebagai kegiatan atau operasi yang dijalankan untuk melindungi kedaulatan negara dan sumber daya alam kelautan, mendukung kelancaran navigasi dan perdagangan, dan pencegahan dari kejahatan transnasional seperti terorisme di laut, perdagangan senjata, pembajakan, perompakan bersenjata, perusakan lingkungan dan imigran ilegal (US Navy, 2010)

Keamanan maritim adalah kondisi dimana tidak ada ancaman terhadap maritim dan stabilitas di lautan seperti sengketa antar negara, terorisme di lautan, pembajakan, perdagangan narkoba, manusia, barang ilegal, kejahatan lingkungan, bencana dan kecelakaan di laut (Bueger, 2015) Ancaman terhadap keamanan maritime bersifat lintas negara, tergolong keamanan non tradisional dan dapat mempengaruhi stabilitas keamanan suatu negara.

Keamanan maritim mengacu kepada segala upaya proteksi sebuah negara terhadap tindakan yang melawan atau bertentangan dengan hukum di laut. Keamanan maritim diartikan sebagai bentuk perlindungan terhadap tanah dan batas wilayah maritime, infrastruktur, ekonomi, lingkungan dan masyarakat dari perbuatan yang membahayakan seperti perompakan, pembajakan dan terorisme (Klein, 2011)

Dewasa ini, perkembangan keamanan maritime Indonesia tidak terlepas dari dinamika kawasan regional di Asia Tenggara. Bergabungnya Indonesia di ASEAN membawa konsekuensi munculnya tantangan keamanan maritim disebabkan kondisi geografis Indonesia yang terbuka dan berbatasan langsung dengan negara di sekitarnya. Kondisi ini memunculkan banyak sekali kejahatan transnasional yang menjadi persoalan bersama di kawasan sebab berdampak kepada keamanan kawasan ASEAN. Benturan kepentingan semakin dirasakan dengan adanya konflik dan dinamika global yang mempengaruhi serta berdampak kepada perkembangan keamanan maritime di Asia Tenggara seperti konflik Laut China Selatan, perang Rusia dan Ukraina, serta adanya Belt Road Initiative yang digagas Tiongkok (Marsetio, 2018)

2. Ancaman Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional dapat berupa perdagangan manusia, narkoba, terorisme, dan lain-lain merupakan fenomena global yang berkembang di lautan. Kejahatan jenis ini melibatkan lebih dari satu negara yang berimplikasi aturan dan peraturan yang berbeda antar negara. Kejahatan transnasional lahir dari pengembangan karakteristik dari kejahatan kontemporer yang terorganisir, kejahatan kerah putih, dan korupsi yang melampaui batas negara sehingga berdampak kepada pelanggaran hukum di berbagai negara dengan karakteristik berbahaya di tingkat internasional (Olii, 2005).

Perserikatan Bangsa-Bangsa menggunakan istilah kejahatan lintas negara sebagai kegiatan kejahatan dengan skala yang luas dan kompleks yang dilakukan kumpulan organisasi yang rumit yang mengeksploitasi pasar ilegal yang ada di lingkungan masyarakat internasional (Sinaga, 2010). Secara garis besar PBB pada tahun 1990 menyatakan bahwa transnational crime adalah tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara, yang meliputi pencucian uang, terorisme, pencurian benda seni dan budaya, pencurian hak intelektual, kejahatan lingkungan, penyelundupan senjata api, pembajakan pesawat terbang, bajak laut, perdagangan orang, perdagangan tubuh manusia, kejahatan perbankan, korupsi, dan penggelapan uang negara (Aprilia, Prakoso, Sudiarso, 2022)

3. Strategi Keamanan Maritim Indonesia

Dalam menghadapi kejahatan transnasional yang belakangan ini marak berkembang di laut, Indonesia selalu berupaya mengadakan diplomasi dan kerjasama aktif dengan negara di ASEAN. Strategi diplomasi dilakukan melalui kerjasama penegak hukum antar negara anggota ASEAN. kerjasama dilakukan mengingat setiap negara memiliki aturan hukum tersendiri dalam merespons berbagai kejahatan transnasional yang disesuaikan kepentingan nasional masing-masing negara. Untuk itu diperlukan sebuah mekanisme kesamaan aturan bersama khususnya dalam membahas keamanan maritime yang terkait pelanggaran hukum di

kawasan ASEAN.

Kedua, Operasi intelijen yang melibatkan pertukaran informasi antar negara ASEAN mengenai kejahatan yang melibatkan aktor regional sehingga menjadi deteksi dini bagi setiap negara dalam menangani kondisi serupa agar tidak terjadi di negara lainnya. Indonesia melibatkan unsur militer baik TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dan instansi pemangku kepentingan lainnya yang rutin mengadakan pertemuan dengan sesama negara di Asia Tenggara. Forum komunikasi ini penting sebagai bentuk kesepahaman kepentingan menjaga kelautan kawasan dan sarana pertukaran informasi serta data intelijen yang mengancam keamanan maritim. Sebab kejahatan transnasional berpotensi berpindah tempat baik secara regional lautan dan daratan sehingga dibutuhkan komunikasi intensif antar negara anggota ASEAN dalam mengungkap aktor kejahatan lokal, regional dan global.

Ketiga, diplomasi maritim Indonesia di Asia Tenggara melalui pembentukan ASEAN Regional Forum sebagai bentuk kerjasama luar negeri yang kolaboratif dan komprehensif sehingga kejahatan yang ada di lautan dapat ditangani secara efektif dan efisien (Mulyadi, 2020) Selain itu, Indonesia ikut bergabung dalam ASEAN *Maritime Forum* (AMF) dan *Expanded ASEAN Maritime Forum* (EAMF). Semua bentuk kerjasama dan diplomasi regional bertujuan menciptakan kawasan lautan yang damai di negara ASEAN, menumbuhkan

norma-norma regional untuk saling menghormati kedaulatan masing-masing negara di bidang kelautan, dan menumbuhkan lautan sebagai sarana eksplorasi untuk kepentingan ekonomi dan kesejahteraan bersama (Hadiningrat, 2020)

KESIMPULAN

Kejahatan transnasional adalah kejahatan lintas negara yang mengancam kelangsungan hidup manusia, eksistensi sebuah negara serta mengganggu kepentingan nasional sebuah negara. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang memiliki potensi kekayaan laut yang berlimpah berpotensi membuat masyarakat Indonesia sejahtera. Tetapi kondisi itu juga menghasilkan ancaman adanya keamanan maritime Indonesia yang terancam oleh berbagai potensi kejahatan transnasional yang melibatkan pelaku kejahatan lokal, regional dan global di lautan. Ancaman keamanan maritime ini tidak hanya berlaku di Indonesia, melainkan juga negara anggota ASEAN.

Keamanan maritim sekarang berkembang ke arah yang non-tradisional sehingga perang tempur di laut mengalami berbagai bentuk pola kejahatan yang melewati batas hukum dan keamanan sebuah negara. Konteks ini, ASEAN sebagai sebuah persekutuan kawasan regional membutuhkan peran aktif dan kesadaran kolektif anggotanya untuk bersama-sama menjaga wilayah laut dari ancaman kejahatan transnasional. Diperlukan kesepahaman bersama bahwa ASEAN sebagai wilayah strategis yang menjadi lalu lintas perdagangan dunia dan perekonomian global

dapat memberikan kedamaian di kawasan sehingga mampu melahirkan perekonomian dan politik keamanan maritim yang stabil sehingga berimplikasi mempercepat kemajuan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan masing-masing anggotanya. Prinsip saling memiliki tanggung jawab bersama menjaga ASEAN yang damai dan tetap menghormati kedaulatan masing-masing negara penting dijalankan ASEAN saat ini.

Indonesia dalam mendorong dan menjaga kedamaian kawasan ASEAN terhadap ancaman keamanan maritime khususnya kejahatan transnasional melakukan tiga langkah strategis. Pertama, mendorong adanya kerjasama lintas negara anggota ASEAN dalam sektor penegakan hukum kelautan dalam mengatasi bahaya kejahatan transnasional dan ancaman keamanan maritime. Kedua, mendorong adanya pertukaran informasi, berbagai pengalaman dan data mengenai tindak pidana kejahatan transnasional yang melibatkan aktor lokal dan regional di masing-masing negara sebagai upaya deteksi dini mengatasi kejahatan transnasional. Ketiga, Indonesia melakukan diplomasi aktif melalui berbagai forum kerjasama tingkat ASEAN khususnya di sektor kelautan dalam mendorong dan menciptakan kawasan lautan yang damai di negara ASEAN, menumbuhkan norma-norma regional untuk saling menghormati kedaulatan masing-masing negara di bidang kelautan, dan menumbuhkan lautan sebagai sarana eksplorasi untuk kepentingan ekonomi dan kesejahteraan

bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Marsetio. (2018). *Perubahan Tatanan Geomaritim Pasca Pembentukan US IndoPacific Command dan Implikasinya Terhadap Konflik Laut China Selatan Dalam Perspektif Indonesia*. Bogor : Universitas Pertahanan.
- Moleong, L.J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remadja Rosdakarya
- N. Klein. (2010). *Maritime Security: International Law and Policy Perspectives from Australia and New Zealand*. Oxon: Routledge.
- US Navy. 2010. *US Naval Operation Concept-Implementing the Maritime Strategy*. Arlington : US Navy.
- Yakti, P.D & I Gede Wahyu Wicaksana. 2021. *Poros Maritim Dunia : Konsep, Strategi dan Realitas*. Malang : Intrans Publishing.
- Bueger C. (2015). What Is Maritime Security. *Marine Policy*, (53): 159-164
- Fajriah AN., Latifah E. (2018). Peran ASEAN Dalam Menanggulangi Terorisme di Laut Sebagai Ancaman Terhadap Keamanan Maritim. *Belli ac Pacis*, 4(1): 21-32
- Hadiningrat JK. (2020). Diplomasi Maritim: Meletakkan Fondasi Poros Maritim Dunia: *Jurnal Maritim Indonesia*, 8(1): 98-109
- Mulyadi. (2020). Indonesia sebagai Poros Maritim



Dunia : Perspektif Keamanan Maritim. *Jurnal Maritim Indonesia*. 8(1): 24-34

Olii, I. (2005). Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnasional Crime. *Jurnal Kriminologi indonesia*, 4 (1): 20.

Safri H, Ridwan (2018). Kebijakan Poros Maritim Dan Keamanan Nasional Indonesia: Tantangan Dan Harapan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(3): 108-121

Sinaga. (2010). Penanggulangan Kejahatan Internasional Cyber Crime di Indonesia. Makalah Bahan Diskusi Seminar Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI)